**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik taat kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terimakasih.

Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Padang, 1 Maret 2017

Kepala DPM & PTSP

Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI, A.P, M.Si,

Pembina Tk. I

NIP. 19740618 199311 1 001

**DAFTAR ISI**

halaman

BAB I GAMBARAN UMUM 1

1. Pendahuluan 1
2. Latar Belakang 1
3. Organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 1
4. Dasar Hukum 3
5. Maksud dan Tujuan 6
6. Ruang Lingkup 6
7. Sekilas Tentang SPIP 7
8. Pengertian 7
9. Tujuan SPIP 7
10. Unsur – unsur SPIP 8
11. Lingkup Pengendalian 8
12. Penilaian Resiko 8
13. Kegiatan Pengendalian 9
14. Informasi dan Komunikasi 10
15. Pemantauan Berkelanjutan 11
16. Pernyataan Tanggung Jawab ( Statemen Of

Responsibilities ) 11

BAB II RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

1. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan 12
2. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Baik 12
3. Kondisi LIngkungan Pengendalian Saat ini 12
4. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian 13
5. Resiko dan Kegiatan Pengendalian 15
6. Pernyataan Tujuan 15
7. Resiko-resiko 15
8. Peta Resiko 17
9. Pengendalian Terpasang 18
10. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan 20
11. Informasi dan Komunikasi 23
12. Pemantauan dan Evaluasi 24
13. Pemantauan dan Evaluasi 24

BAB III Penutup 27

Lampiran

**DAFTAR TABEL**

halaman

Tabel 1.1 Susunan Keanggotaan Satuan Tugas SPIP di DPM PTSP

Provinsi Sumatera Barat 2

Tabel 2.1 Kondisi Lingkungan Pengendalian DPM & PTSP

Provinsi Sumatera Barat 13

Tabel 2.2 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian DPM & PTSP

Provinsi Sumatera Barat 14

**BAB I**

**GAMBARAN UMUM**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

S

ebagai kelanjutan Reformasi Birokrasi dibidang Keuangan Negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good* *governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan Negara/daerah. Mengingat pentingnya Sistem Pengendalian Intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintahan untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga penyelenggara pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. **Organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**

**a. Susunan Satuan Tugas SPIP di DPM & PTSP Sumatera Barat Tahun 2017**

Untuk mendukung penyelenggaraan SPIP pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan Keputusan Kepala DPM & PTSP Nomor 900/13/KEP/DPM&PTSP-2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Susunan Keanggotaan**

**Satuan Tugas SPIP di DPM & PTSP**

**Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA/NIP** | **JABATAN** | **KEDUDUKAN DALAM SATGAS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Maswar Dedi, A.P. M.Si | Kepala | Pengarah |
| 2. | Widya Sari, SE. Ak. MM | Sekretaris | Koordinator |
| 3. | Ir. Ollyandes, S. Pt | Kepala Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Ketua |
| 4. | Indra Utama, A.P, M.Si | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Wakil Ketua |
| 5. | Delmi, B.Sc | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Wakil Ketua |
| 6. | Wastini, S.H, M.Hum | Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal | Wakil Ketua |
| 7. | Etna Lely, S.Sos, M.M | Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan | Wakil Ketua |
| 8. | Syafwirdi, S.E, M.Si | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Sekretaris |
| 9. | Fatma Iryani, SH | Kasubag Umum | Koordinator Sekretariat |
| 10. | Nova Siska, SE | Staf Sekretariat | Sekretariat |
| 11. | Harni Novita, A. Md | Staf Sekretariat | Sekretariat |
| 12. | Novli Yanti, A.Md | Staf Sekretariat | Sekretariat |

1. **Struktur Organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**

**a). Tugas Pokok dan Fungsi DPM & PTSP**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 39 Tahun 2017, Tugas Pokok dan Fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembagian urusan Pemerintah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerja sama Dunia Usaha.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok DPM & PTSP Provinsi mempunyai fungsi :
   * + 1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
       2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
       3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
       4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha; dan
       5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**b). Tata Kerja**

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

1. **Sumber Daya pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, DPM & PTSP Sumatera Barat di dukung oleh personil sebanyak 60 orang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta Staf.

Jumlah pegawai menurut Kesekretariatan serta pada bidang-bidang yang ada di DPM & PTSP Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat sebanyak 20 orang
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM sebanyak 9 orang
3. Bidang Promosi Penanaman Modal sebanyak 5 orang
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM dan Sistem Informasi PM sebanyak 8 orang
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 11 orang
6. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebanyak 4 orang

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Ruang adalah sebagai berikut:

a. Golongan IV sebanyak 10 orang (IVa=6 orang, IVb=4 orang)

b. Golongan III sebanyak 37 orang (IIIa= 3 orang, IIIb=15 orang, IIIc=10 orang, IIId=9 orang)

c. Golongan II sebanyak 12 orang (IIb=5 orang, IIc=6 orang, IId=1 orang)

d. Golongan I sebanyak NIHIL

1. **Visi dan Misi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021**

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

**Visi :**

**“** Menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menarik, unggul dan berdayasaing”.

**Misi:**

1. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat
2. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan tujuan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdaya saing dan mengoptimalkan kapasitas lembaga;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional;
3. **Tujuan dan Sasaran**

Dalam mencapai tujuan di atas , ditetapkan sasaran-sasaran, sebagai berikut :

**Tujuan 1** : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdaya saing dan mengoptimalkan kapasitas lembaga;

Untuk mencapai tujuan di atas, ditetapkan sasaran- sasaran sebagai berikut :

* + Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat
  + Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat
  + Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor

**Tujuan 2 :** Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara

inovatif dan profesional;

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

* + Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu

1. **Dasar Hukum**
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946 jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1979);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan SPIP di lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
13. Keputusan Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/13/KEP/DPM & PTSP/2017 Tahun 2017tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat.
14. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam pengendalian risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

1. **Ruang Lingkup**

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2017.

1. **Manfaat**

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2017 ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal :

a. Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh dilingkungan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat;

b. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;

c. Pendokumentasian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SPIP lingkup DPM & PTSPT Provinsi Sumatera Barat.

1. **SEKILAS TENTANG SPIP**
   * 1. **Pengertian**

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset Negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, menaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan tersebut kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta meningkatnya efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

* + 1. **Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk meningkatkan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

* + 1. **Unsur - unsur SPIP**

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

* + - * 1. **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintahan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplemetasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi tersebut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu :

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Perwujudan dan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
   * + - 1. **Penilaian Risiko**

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Penilaian Risiko bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal;
2. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam 3 tahap kegiatan, yang terdiri atas :

1. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktifitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu;
2. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi menganggu pencapaian tujuan aktifitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
3. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.
   * + - 1. **Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penetapan kebijakan SPIP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sekurang- kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

* Mempertimbangkan *cost and benefit*
* Tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan
* Jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan interprestasi dalam pelaksanaannya
* Memperhatikan bentuk-bentuk kegiatan pengendalian yang umum
* Menetapkan informasi serta media, bentuk, dan sarana komunikasi utama yang dibutuhkan agar kegiatan pengendalian dapat dijalankan
* Menetapkan dengan jelas pemilik / penanggung jawab pelaksanaan tindakan perbaikan

- Menetapkan target waktu penyelesaian perbaikan

- Jika memungkinkan, kegiatan pengendalian yang dibangun dapat digunakan untuk mengendalikan lebih dari satu risiko.

Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

* Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdaya saing dan mengoptimalkan kapasitas lembaga;
* Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional;
  + - * 1. **Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan Komunikasi yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi pengumpulan dan penyajian kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

* + - * 1. **Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintahan telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

* + 1. **Pernyataan Tanggung Jawab** **(*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyatan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntasi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan. Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan Sistem Pengendalian Intern yang ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

**BAB II**

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

1. **PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**
   * 1. **Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik**

U

nsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur – unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Secara khusus pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai- nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan;
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.
   * 1. **Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environtmen Evaluation (CEE)*, bahwa dalam rangka penerapan SPIP diperlukan lingkungan pengendalian yang baik. Dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian diperlukan suatu metode untuk mengevaluasi lingkungan pengendalian sehingga dapat diketahui kekuatan maupun kelemahan lingkungan pengendalian yang ada yang selanjutnya dapat direncanakan perbaikan atas kelemahan yang masih ada.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, diperoleh gambaran lingkungan pengendalian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kondisi Lingkungan Pengendalian DPM & PTSP**

**Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Unsur** | **Kondisi** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | Cukup Memadai |
| 2 | Komitmen terhadap Kompetensi | Cukup Memadai |
| 3 | Kepemimpinan yang Kondusif | Kurang Memadai |
| 4 | Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan | Tidak Memadai |
| 5 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | Kurang Memadai |
| 6 | Kebijakan Pengembangan SDM | Tidak Memadai |
| 7 | Pengawasan Internal yang Efektif | Tidak Memadai |
| 8 | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah | Tidak Memadai |

Lingkungan pengendalian DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat diperoleh dengan pengisian kuesioner CEE *(Control Environtment Evaluation)* yang disebarkan kepada seluruh Pegawai DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 47 responden dari 59 kuesioner yang dibagikan.

Penilaian Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian sebagaimana tersebut di atas, meliputi :

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
2. Komitmen terhadap Kompetisi
3. Kepemimpinan yang Kondusif
4. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
7. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
   * 1. **Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

**DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Unsur** | **Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian** |
| **1** | **2** | **3** |
| I | Penegakan   Integritas dan   Nilai Etika | Sosialisasi Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Perlaku Aparatur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat |
| Menyusun kode etik tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan turunan Pergub Nomor 55 tahun 2012 dalam bentuk Keputusan Kepala DPM & PTSP. |
| Sosialisasi kode etik tingkat DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat |
| Membuat mekanisme penyampaian aturan dan kode etik ke pihak ketiga |
| II | Komitmen terhadap  Kompetensi | Sosilisasi Pergub. tentang Pola Karir PNS di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dalam hal mutasi dan rotasi Pengelola Keuangan dan Barang |
| Evaluasi kompetensi aparatur, khususnya pengelola keuangan dan barang di seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat |
| Melaksanakan diklat dan sertifikasi pegawai yang menjalankan tugas khusus |
| Menetapkan analisa kebutuhan diklat untuk pegawai |
| III | Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Evaluasi Kompetensi dan kecukupan aparatur, khususnya pengelola keuangan dan barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat |
| Mengajukan permohonan penambahan pegawai sesuai kebutuhan |
| IV | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab | Melakukan reviu bulanan secara berjenjang terhadap kinerja aparatur dibawahnya masing- masing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai Pergub. tentang Penilaian Kinerja |
| V | Kebijakan Pengembangan SDM | Membuat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait penempatan SDM pada posisi kunci agar disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan. |
| VI | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah | Melakukan Rapat Koordinasi dengan Instansi Penanaman Modal Kab/Kota secara Periodik |

*Rincian rencana perbaikan dimaksud tertuang dalam Lampiran 1.*

1. **RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN**
2. **Pernyataan Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Dalam tahun 2016, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan mengoptimalkan kapasitas lembaga.

Tujuan DPM & PTSP sebagaimana tersebut diatas dikatakan tercapai apabila :

* Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat
* Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat
* Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional.

Tujuan DPM & PTSP sebagaimana tersebut diatas dikatakan tercapai apabila meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. **Risiko – Risiko**

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu :

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

1. Peserta yang hadir bukan orang yang menangani LKPM, sehingga LKPM yang disampaikan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.
2. Tidak semua perusahaan PMA dan PMDN yang dapat diberikan pemahaman dalam mengisi LKPM sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian LKPM oleh perusahaan
3. Sedikit sekali (hanya sebagian kecil) perusahaan PMA dan PMDN yang dapat dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal akan menghambat penyampaian LKPM oleh perusahaan dan pencabutan/ pembatalan Izin Prinsip
4. Peserta yang hadir tidak sesuai dengan kompetensi sehingga akan menghambat penyediaan data realisasi investasi PMA dan PMDN sesuai dengan target yang telah ditetapkan
5. Rendahnya pengetahuan aparatur Kabupaten dan Kota dalam memahami pengendalian pelaksanaan penanaman modal sehingga akan menghambat upaya penggumpulan data realisasi investasi di daerah
6. Tidak diperoleh kesepakatan bersama antar pihak yang bermasalah dan hanya dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak didapatkannya solusi akhir penyelesaian permasalahan tersebut.
7. DPM & PTSP Kabupaten Kota tidak menyampaikan permasalahan investasi ke DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat sehingga menghambat upaya penyelesaian permasalahan investasi di Kabupaten Kota melalui diskusi dalam Forum Investasi Sumatera Barat
8. Pejabat yang hadir lebih didominasi oleh Eselon IV dan Staf sehingga menghambat pelaksanaan penyelesaian permasalahan investasi di Kabupaten/ Kota
9. Rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan terhadap aturan/kebijakan terkait penanaman modal akan dapat mengarah kepada premanisme, pungutan liar permasalahan lahan dan permasalahan perusahaan didalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal
10. Aparatur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat masih berorientasi kepada peningkatan PAD sehingga akan dapat mengarah kepada tidak adanya insentif yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada investor
11. Data kurang valid sehingga sulit digunakan untuk mengambil keputusan/kebijakan di Bidang Penanaman modal
12. Potensi dan peluang investasi yang disusun tidak dapat mengakomodir seluruh usulan kabupaten/kota
13. Penyusunan FS Bidang usaha yang disusun belum didukung data lokasi yang valid
14. Hasil rumusan tidak dapat ditindaklanjuti oleh provinsi maupun kabupaten/kota
15. Masih terdapatnya permasalahan lahan yang belum clear and clean sehingga dapat berakibat terkendalanya penetapan KEK Sumatera Barat
16. Materi peluang investasi sektor unggulan kabupaten/kota tidak semuanya dapat terpenuhi sesuai data yang diharapkan/diinginkan .
17. Sedikit atau tidak ada sama sekali calon investor yang tertarik menanamkan modalnya di Sumbar kurun waktu satu tahun.
18. Tidak siapnya kabupaten/kota dengan data peluang investasi sektor unggulan daerahnya untuk dipresentasikan/digelarkan
19. Tidak terlaksananya koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota terkait rencana dan kerjasama promosi Sumatera Barat.
20. Data yang tidak akurat akan menjadi kendala bagi calon investor dalam keinginan berinvestasi
21. Rendahnya relisasi investasi pengembangan wisata dan pengembangan industri karena masih adanya beberapa hambatan investasi.
22. Rendahnya relisasi investasi antara Usaha Besar dengan UMKMK karena beberapa hambatan investasi.

Risiko atas pencapaian tujuan 2:

1. Jumlah personil yang terbatas tidak sesuai dengan beban kerja dapat menghambat dalam melaksanakan penerbitan perizinan tepat waktu
2. Proses verifikasi dokumen untuk kajian teknis yang lama di SKPD Teknis akan memperlambat proses penerbitan izin
3. Mekanisme proses pelayanan pada PTSP belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi akan menghambat proses penerbitan perizinan
4. Jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan kompetensi sehingga akan menghambat penguatan kelembagaan PTSP
5. Kemampuan teknis aparatur dalam penyelesaian pekerjaan masih rendah akan menghambat pada penyelesaian proses penerbitan perizinan.
6. **Peta Risiko**

Berdasarkan analisis risiko yang dilakukan terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi maka didapatkan hasil analisis atas risiko-risiko tersebut memperlihatkan peta risiko DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

**Gambar 2.1**

**Peta Risiko DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Keterangan :***

PM = Promosi Penanaman Modal

PT = Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

D = Pengendalian dan Pembinaan

R = Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. **Pengendalian Terpasang**

Sampai dengan saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat kepada perusahaan agar mengirim staf yang menangani LKPM dan tetap memberikan pemahaman kepada peserta yang hadir agar bisa memahami penyampaian LKPM
2. Melaksanakan bimbingan teknis pengisian dan penyampaian LKPM kepada perusahaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada.
3. Melaksanakan pengawasan ke perusahaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada.
4. Membuat surat kepada DPM & PTSP Kab/ Kota agar mengirim utusan sesuai dengan spesifikasi dan tetap memberikan pemahaman kepada peserta yang hadir tentang pengumpulan data realisasi investasi di kabupaten/kota
5. Memberikan materi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal terutama dalam pengumpulan data realisasi investasi
6. Membuat laporan hasil penyelesaian permasalahan investasi
7. Melakukan permintaan data dan informasi permasalahan melalui surat ke Kabupaten Kota
8. Membuat surat kepada DPM & PTSP Kab/ Kota agar mengirim utusan sesuai dengan kualifikasi dan tetap memberikan materi kepada peserta yang hadir dalam bimtek penyelesaian permasalahan investasi
9. Sosialisasi kebijakan baru dilaksanakan pada beberapa kabupaten dengan peserta dari beberapa wali nagari, KAN dan dunia usaha serta seluruh camat dan SKPD terkait
10. Melibatkan SKPD dari sektor terkait didalam pembahasan draft ranpergub
11. memberikan bimbingan terkait pengisian format yang diminta
12. Mengumpulkan data dan informasi potensi kabupaten/kota dan studi kelayakan proyek investasi kabupaten/kota
13. mengidentifikasi dan survey lokasi rencana proyek investasi
14. Hasil rumusan langsung dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota
15. koordinasi dengan pusat dan SKPD terkait
16. Mengumpulkan data per kabupaten / kota dan seleksi menurut potensi, peluang sektor yang dominan atau unggulan sebagai bahan materi promosi investasi.
17. Promosi Investasi yang bersifat presentasi, pameran, mengundang calon investor, menerima calon investor , serta mengunjungi calon investor ( pro aktif)
18. Koordinasi dengan kabupaten/kota, melaksanakan rapat persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan .
19. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait kegiatan bersama
20. SDM yang menguasai tentang pembuatan data Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal tersebut
21. Koordinasi dengan lembaga/instansi/dunia usaha terkait secara periodik dalam menjual potensi daerah
22. Koordinasi dengan lembaga/instansi/dunia usaha terkait secara periodik dalam menjual potensi daerah
23. Penambahan sementara dari pegawai magang
24. Bidang PTSP dan SKPD Teknis melakukan verifikasi melalui surat-menyurat
25. Pelayanan penerbitan perizinan penanaman modal PMDN telah menggunakan SPIPISE.
26. Undangan peserta rapat penyelenggaraan Forum PTSP ditujukan kepada kepala Instansi penanaman modal kab/kota.
27. Aparatur pelayanan perizinan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar pelayanan.
28. **Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

**Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut.**

**Tujuan 1 :** Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan mengoptimalkan kapasitas lembaga

**Risiko 1:**

* Melakukan pendataan personil atau staf di perusahaan yang bertanggung jawab menangani LKPM

**Risiko 2:**

* Melakukan pendataan perusahaan yang harus diberikan bimbingan teknis pengisian LKPM

**Risiko 3:**

* Melakukan peningkatan jumlah pengawasan ke perusahaan PMA dan PMDN

**Risiko 4:**

* Membuat komitmen bersama dengan seluruh DPM & PTSP Kabupaten/Kota dalam mengumpulkan data realisasi investasi sesuai dengan target

**Risiko 5:**

* Melaksanakan pendidikan dan Pelatihan, Workshop bagi aparatur Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

**Risiko 6:**

* Melaksanakan evaluasi hasil dari Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan investasi

**Risiko 7:**

* Melaksanakan evaluasi hasil dari Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan investasi

**Risiko 8:**

* Membuat komitment/ kesepakatan dengan seluruh DPM & PTSP Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan investasi di daerah

**Risiko 9:**

* mengusulkan Penambahan jumlah peserta dan daerah lokasi sosialisasi

**Risiko 10:**

* Penegasan dari pimpinan terkait komitmen pemberian insentif dan kemudahan bagi investor

**Risiko 11:**

* Membentuk Tim pemantauan realisasi investasi yang melibatkan kabupaten/kota dan menambah jumlah aparatur pengendalian serta mengadakan pelatihan terkait pemantauan ralisasi investasi.

**Risiko 12:**

* Sinkronisasi potensi dan peluang investasi dengan kabupaten/kota

**Risiko 13:**

* Penegasan dari pimpinan terkait ketersediaan lahan di rencana lokasi proyek

**Risiko 14:**

* Penyampaian hasil rumusan melalui surat Gubernur kepada kabupaten/kota

**Risiko 15:**

* mengusulkan ke pusat atau ke Gubernur terkait survey keadaan lahan

**Risiko 16:**

* Koordinasi berkelanjutan dengan Kabupaten/Kota untuk memperoleh data yang akurat tentang potensi dan peluang investasi di daerahnya dan selalu update data

**Risiko 17:**

* Promosi Investasi yang bersifat Komprehensif serta *one on one meeting*

**Risiko 18:**

* Koordinasi yang lebih alot dengan kabupaten/kota serta memperhatikan alokasi waktu serta rencana yang telah disepakati.

**Risiko 19:**

* Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar SKPD, antar bidang di DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

**Risiko 20:**

* Penambahan Tenaga SDM yang profesional yang mengerti dengan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal

**Risiko 21:**

* Koordinasi dan Data yang lengkap/akurat serta serta anggaran yang cukup agar misi dapat terlaksana dengan baik

**Risiko 22:**

* Koordinasi dan Data yang lengkap/akurat serta anggaran yang cukup agar rencana dapat terlaksana dengan baik

**Tujuan 2 :** Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional.

**Risiko 1:**

* Penambahan personil dari BKD

**Risiko 2:**

* Komitmen dari Dinas Teknis untuk percepatan penerbitan izin pemohon

**Risiko 3:**

* Mengusulkan kegiatan Penerapan teknologi informasi pada mekanisme pelayanan perizinan

**Risiko 4:**

* Perlu penegasan tentang kehadiran pejabat terkait penyelenggaran PTSP

**Risiko 5:**

* Pendidikan dan Pelatihan kemampuan teknis sektor perizinan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan prosedur operasi standar yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

1. **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

* + Surat permintaan data staf yang menangani LKPM di perusahaan
  + Surat permintaan penambahan anggaran
  + Surat permintaan untuk melaksanakan pengumpulan data realisasi investasi, surat untuk mencapai target realisasi investasi di Kabupaten/Kota
  + Surat Edaran, Surat Tugas, Surat permintaan pelaksanaan Diklat pengendalian penanaman modal
  + Surat penyampaian hasil Rapat Fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi
  + Surat edaran, surat permintaan peserta Bimtek
  + pengajuan usulan penambahan anggaran pada perubahan anggaran
  + Surat Edaran Gubernur
  + SK Gubernur
  + Undangan rapat
  + Surat permintaan kejelasan ketersediaan lahan di rencana lokasi proyek
  + Surat Gubernur
  + Surat ke Kabupaten/Kota, evaluasi/monitoring.
  + Pameran, Presentasi *one on one meeting*, forum investasi
  + Surat ke Kabupaten/Kota, Rapat Persiapan, Rapat Pelaksanaan, rapat evaluasi/monitoring.
  + Surat ke kabupaten/kota, Rapat persiapan, Rapat pelaksanaan, Rapat evaluasi/monitoring, Palatihan/Sosialisasi SDM tentang Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
  + Surat ke Kabupaten/Kota, Rapat Persiapan, Rapat Pelaksanaan, rapat evaluasi/monitoring.
  + Surat Permintaan Penambahan Pegawai
  + Instruksi Pimpinan berupa peraturan (SK Gubernur atau Pergub)
  + Instruksi Pimpinan, Dokumen rencana pembangunan sistem informasi pada mekanisme pelayanan perizinan
  + Surat Edaran, Surat Tugas
  + Surat Undangan, Rapat, Sosialisasi
  + Surat Edaran, Surat Tugas

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

1. **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. **Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk menyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja SKPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut.

* Evaluasi berkelanjutan atas Pendataan personil atau staf di perusahaan yang bertanggung jawab menangani LKPM
* Evaluasi berkelanjutan atas pendataan perusahaan yang harus diberikan bimbingan teknis pengisian LKPM
* Evaluasi berkelanjutan atas peningkatan jumlah pengawasan ke perusahaan PMA dan PMDN
* Evaluasi berkelanjutan atas komitment bersama dengan seluruh DPM & PTSP Kabupaten/Kota dalam mengumpulkan data realisasi investasi sesuai dengan target
* Evaluasi berkelanjutan atas pendidikan dan Pelatihan, Workshop bagi aparatur Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
* Evaluasi berkelanjutan atas evaluasi hasil dari Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan investasi
* Evaluasi berkelanjutan atas komitment/ kesepakatan dengan seluruh DPM & PTSP Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan investasi di daerah
* Pemantauan berkelanjutan atas pengusulan Penambahan jumlah peserta dan daerah lokasi sosialisasi
* Pemantauan berkelanjutan atas penegasan dari pimpinan terkait komitmen pemberian insentif dan kemudahan bagi investor
* Pemantauan berkelanjutan atas pembentukan Tim pemantauan realisasi investasi yang melibatkan kabupaten/kota dan menambah jumlah aparatur pengendalian serta mengadakan pelatihan terkait pemantauan ralisasi investasi
* Pemantauan berkelanjutan atas sinkronisasi potensi dan peluang investasi dengan kabupaten/kota
* Pemantauan berkelanjutan atas penegasan dari pimpinan terkait ketersediaan lahan di rencana lokasi proyek
* Pemantauan berkelanjutan atas penyampaian hasil rumusan melalui surat Gubernur kepada kabupaten/kota
* Pemantauan berkelanjutan atas mengusulkan ke pusat atau ke Gubernur terkait survey keadaan lahan
* Pemantauan berkelanjutan atas Koordinasi berkelanjutan dengan Kabupaten / Kota untuk memperoleh data yang akurat tentang potensi dan peluang investasi di daerahnya dan selalu update data
* Pemantauan berkelanjutan atas Promosi Investasi yang bersifat Komprehensif serta *one on one meeting*
* Pemantauan berkelanjutan atas Koordinasi yang lebih alot dengan kabupaten /kota serta memperhatikan alokasi waktu serta rencana yang telah disepakati.
* Pemantauan berkelanjutan atas Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar SKPD, antar bidang di DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
* Pemantauan berkelanjutan atas penambahan Tenaga SDM yang profesional yang mengerti dengan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
* Pemantauan berkelanjutan atas koordinasi dan Data yang lengkap/akurat serta serta anggaran yang cukup agar misi dapat terlaksana dengan baik
* Pemantauan berkelanjutan atas koordinasi dan Data yang lengkap/akurat serta serta anggaran yang cukup agar rencana dapat terlaksana dengan baik
* Evaluasi berkelanjutan atas Komitmen dari Dinas Teknis untuk percepatan penerbitan izin pemohon
* Evaluasi berkelanjutan atas Mengusulkan kegiatan Penerapan teknologi informasi pada mekanisme pelayanan perizinan
* Evaluasi berkelanjutan atas Pelatihan bagi personil untuk semua sektor perizinan
* Evaluasi berkelanjutan atas Perlu penegasan tentang kehadiran pejabat terkait penyelenggaran PTSP
* Evaluasi berkelanjutan atas Pendidikan dan Pelatihan kemampuan teknis sektor perizinan

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam lampiran 5.

1. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

1. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tindak lanjutnya.

1. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Gubernur.

**BAB III**

**Penutup**

R

encana Tindak Pengendalian Intern DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dokumrn penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan tercapai.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Padang, 01 Maret 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI, A.P, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740618 199311 1 001

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN** | | | | | | |
| **Lampiran 1** | | | | | | |
| **No.** | **Kondisi Lingkungsn Pengendalian yang Belum Memadai** | | **Rencana Tindak Perbaikan / Penguatan Lingkungan Pengendalian** | **Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan** | | **Target Waktu Penyelesaian** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** |
| **I** | **Penegakan integritas dan Nilai Etika** | | | | | |
| 1 | Pengembangan integritas dan nilai etika | | Menyusun kode etik tingkat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan turunan Peraturan Gubernur No. dalam bentuk Keputusan Kepala DPM & PTSP | DPM & PTSP  Provinsi Sumatera Barat | | Triwulan IV 2017 |
| 2 | Pengkomunikasian | | Sosialisasi kode etik tingkat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat | DPM & PTSP  Provinsi Sumatera Barat | | Triwulan IV 2017 |
| Membuat mekanisme penyampaian aturan dan kode etik kepada pihak ketiga | Bagian Hukum dan Inspektorat | | Akhir 2017 |
| **II** | **Komitmen terhadap Kompetensi** | | | | | |
| 1 | Identifikasi Kompetensi | | Evaluasi kompetensi aparatur, khususnya pengelola keuangan dan barang di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat | BKD dan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Akhir 2017 |
| 2 | Pemanfaatan individu yang memiliki kompetensi | | Melaksanakan diklat dan sertifikasi pegawai yang menjalankan tugas khusus | Badan Diklat | | Triwulan II 2017 |
| **III** | **Kepemimpinan yang Kondusif** | | | | | |
| 1 | Menyesuaikan Tugas dengan Kompetensi dan Keahlian | | Penempatan dan uraian tugas pegawai berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki | BKD dan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Akhir 2017 |
| 2 | Meningkatkan Pemahaman Terhadap SPIP | | Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai | BPKP dan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Triwulan II 2017 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| **IV** | **Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan** | | | | | |
| 1 | Menjaga Kelansungan Proses | | Evaluasi kompetensi dan kecukupan aparatur, khususnya pengelola keuangan dan barang pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat | BKD dan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Akhir 2017 |
| **V** | **Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab** | | | | | |
| 1 | Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko | Melakukan reviu bulanan secara berjenjang terhadap kinerja aparatur dibawahnya pada masing-masing Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai Peraturan Gubernur tentang penilaian kinerja | | | DPM & PTSP  Provinsi Sumatera Barat | Akhir 2017 |
| **VI** | **Kebijakan Pengembangan SDM** | | | | | |
| 1 | Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci | Membuat usulan untuk penempatan SDM pada posisi kunci sesuai kompetensi dan kebutuhan | | | BKD dan DPM & PTSP  Provinsi Sumatera Barat | Akhir 2017 |
| 2 | Menyusun Program Pengembangan SDM | Menyusun perencanaan pelatihan untuk peningkatan SDM | | | DPM & PTSP  Provinsi Sumatera Barat | Akhir 2017 |
| **VII** | **Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah** | | | | | |
| 1 | Koordinasi dan Konsultasi dengan Pihak Terkait | Melakukan Rapat Koordinasi dengan Instansi Penanaman Modal Kab/Kota secara Periodik (Minimal 2 kali setahun) | | | BKD dan DPM & PTSP  Provinsi Sumatera Barat | Akhir 2017 |
|  |  |  | | |  |  |

Padang, 1 Maret 2017

Kepala DPM & PTSP

Provinsi Sumatera Barat

Maswar Dedi, AP.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740618 199311 1 001

**DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI**

**Lampiran 2**

**Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi.**

**Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Informasi Penanaman Modal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Pemilik Risiko** | **Penyebab** | **Dampak pada Capaian Tujuan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Peserta yang hadir bukan orang yang menangani LKPM, sehingga LKPM yang disampaikan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. | Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Kurangnya komitment Perusahaan PMA dan PMDN untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan LKPM | Komitment perusahaan yang rendah akan mempengaruhi penyampaian LKPM ke DPM & PTSP Kabupaten Kota, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, dan BKPM RI |
| Tidak semua perusahaan PMA dan PMDN yang dapat diberikan pemahaman dalam mengisi LKPM sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian LKPM oleh perusahaan |  | Terbatasnya Anggaran sehingga setiap pengusulan penambahan anggaran guna memperbanyak perusahaan yang diundang tidak dapat diakomodir oleh tim anggaran | Anggaran yang terbatas mempengaruhi jumlah perusahaan PMA/PMDN yang diberikan bimbingan dan penyuluhan penanaman modal terutama pengisian LKPM yang benar dan tepat sasaran |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Sedikit sekali (hanya sebagian kecil) perusahaan PMA dan PMDN yang dapat dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal akan menghambat penyampaian LKPM oleh perusahaan dan pencabutan/ pembatalan Izin Prinsip | Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Terbatasnya Anggaran sehingga setiap pengusulan penambahan anggaran guna memperbanyak perusahaan yang diundang tidak dapat diakomodir oleh tim anggaran | Anggaran yang terbatas mempengaruhi jumlah perusahaan PMA/PMDN yang ada di Sumatera Barat |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Peserta yang hadir tidak sesuai dengan kompetensi sehingga akan menghambat penyediaan data realisasi investasi PMA dan PMDN sesuai dengan target yang telah ditetapkan | Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Banyak DPM & PTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki permasalahan kekurangan SDM Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal baik secara kuantitas maupun kualitas | Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM dibidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempengaruhi pencapaian target realisasi investasi kabupaten/Kota |
| Rendahnya pengetahuan aparatur Kabupaten dan Kota dalam memahami pengendalian pelaksanaan penanaman modal sehingga akan menghambat upaya penggumpulan data realisasi investasi di daerah |  | Kurangnya Sosialisasi pengendalian penanaman modal bagi aparatur DPM & PTSP bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal | Pengetahuan dan keahlian yang rendah dalam bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal mempengaruhi pengumpulan data realisasi investasi di kabupaten/kota |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Tidak diperoleh kesepakatan bersama antar pihak yang bermasalah dan hanya dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak didapatkannya solusi akhir penyelesaian permasalahan tersebut. | Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Pihak yang bermasalah tidak ada yang mau mengalah sehingga membuat penyelesaian permasalahan tidak dapat terlaksana secara baik-baik | Tidak adanya kesepakatan antara pihak yang bermasalah dalam penyelesaian investasi berpengaruh pada tingkat penyelesaian permasalahan |
|  |  |  |  |  |
| 5 | DPM & PTSP Kabupaten Kota tidak menyampaikan permasalahan investasi ke DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat sehingga menghambat upaya penyelesaian permasalahan investasi di Kabupaten Kota melalui diskusi dalam Forum Investasi Sumatera Barat | Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Lemahnya pemahaman DPM & PTSP Kabupaten/Kota dalam memahamitugas pengendalian pelaksanaan penanaman modal terutama dalam menginventarisasi dan melaporkan permasalahan investasi ke DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | Inventarisasi dan penyampaian permasalahan investasi di kabupaten/kota oleh DPM & PTSP kabupaten/kota ke DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi pembahasan penyelesaian permasalahan tersebut pada diskusi Forum Investasi Sumatera Barat |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Pejabat yang hadir lebih didominasi oleh Eselon IV dan Staf sehingga menghambat pelaksanaan penyelesaian permasalahan investasi di Kabupaten/ Kota | Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Terbatasnya jumlah aparatur bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota sehingga tidak mampu menugaskan eslon II atau eselon III untuk mengikuti bimbingan teknis penyelesaian permasalahan investasi | Level eselon pejabat yang mengikuti bimbingan teknis  penyelesaian permasalahan dan penerapan penyelesaian permasalahan investasi di kabupaten/kota |
| 7 | Data kurang valid sehingga sulit digunakan untuk mengambil keputusan/kebijakan di Bidang Penanaman modal |  | Kurangnya komitmen aparatur tentang pentingnya pemberian data yang valid, sehingga jarang yang mau mengoreksi data lama untuk diperbarui sesuai dengan aturan yang yang berlaku | Oleh Karena data yang didapat kurang valid maka agak sulit untuk menyediakan informasi yang lebih informatif sehingga akan mempengaruhi kualitas perencanaan |
|  |  |  |  |  |
| 8 | Masih terdapatnya permasalahan lahan yang belum celar and clean sehingga dapat berakibat terkendalanya penetapan KEK Sumatera Barat |  | Lahan yang direncanakan untuk kawasan KEK sebagian besar merupakan tanah ulayat sehingga mempengaruhi percepatan penetapan KEK Sumatera Barat | Permasalahan lahan yang belum clearand clear akan memepangaruhi percepatan penetapan KEK Sumatera Barat |
|  |  |  |  |  |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | |  | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan**  **SIstem Informasi Penanaman Modal**  **Ir. OLLYANDES, S.Pt**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19660625 199211 1 001** | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI** | | | | |
|  | | | | |
| **Lampiran 2** | | | | |
| **Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi.** | | | | |
| **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | | | | |
|  | | | | |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Pemilik Risiko** | **Penyebab** | **Dampak pada Capaian Tujuan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan terhadap aturan/kebijakan terkait penanaman modal akan dapat mengarah kepada premanisme, pungutan liar dan permasalahan lahan | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Terbatasnya peserta dan daerah lokasi pemberian sosialisasi aturan/kebijakan terkait penanaman modal kepada penyelenggara pemerintahan di daerah, tokoh masyarakat dan perusahaan mempengaruhi kenyamanan berusaha bagi investor | Rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan di daerah, tokoh masyarakat dan dunia usaha terkait kebijakan/regulasi di bidang penanaman modal akan mempengaruhi |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Aparatur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat masih berorientasi kepada peningkatan PAD sehingga akan dapat mengarah kepada tidak adanya insentif yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada investor |  | kurangnya komitmen pimpinan untuk memberikan insentif kepada investor mempengaruhi ada tidaknya insentif yang akan diberikan kepada investor | Aparatur penyelenggara yang masih berorientasi kepada peningkatan PAD akan mempengaruhi ada tidaknya insentif yang akan diberikan kepada investor |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Potensi dan peluang investasi yang disusun tidak dapat mengakomodir seluruh usulan kabupaten/kota |  | Kurangnya ketersediaan data yang valid dan terukur untuk suatu potensi sehingga mengakibatkan kesulitan didalam penyusunan peluang investasi | Belum tergambarnya semua potensi yang ada di Sumatera Barat secara detail dan yang terkaji kelayakannya |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Penyusunan FS Bidang usaha yang disusun belum didukung data lokasi yang valid |  | Belum diperolehnya data ketersediaan lahan yang clear and clean dari daerah | Data lokasi yang belum valid akan mempengaruhi kualitas FS yang akan disusun |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Hasil rumusan tidak dapat ditindaklanjuti oleh provinsi maupun kabupaten/kota |  | Kurangnya komitmen pimpinan untuk menjadikan investasi sebagai prioritas daerah | Kurangnya komitmen pimpinan akan mengakibatkan hasil rumusan tidak dapat ditindaklanjuti oleh daerah |
|  |  |  |  |  |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan**  **Iklim Penanaman Modal**    **DELMI, B.Sc**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19611016 198603 1 003** | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI** | | | | |
| **Lampiran 2** | | | | |
| **Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi.** | | | |  |
| **Bidang Promosi Penanaman Modal** | | | |  |
|  | | | |  |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Pemilik Risiko** | **Penyebab** | **Dampak pada Capaian Tujuan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Materi Peluang investasi sektor unggulan kabupaten/kota tidak semuanya dapat terpenuhi sesuai data yang diharapkan/diinginkan . | Bidang Promosi Penanaman Modal | Tidak tersedianya data di Kabupaten/Kota yang akurat dan lengkap karena keterbatasan SDM dan Sumber Daya yang ada | Tidak optimalnya informasi Promosi investasi yang akurat dalam upaya mendapatkan calon investor yang berminat berinvestasi di sektor unggulan di Sumatera Barat |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Sedikit atau Tidak ada sama sekali calon investor yang tertarik menanamkan modalnya di Sumbar kurun waktu satu tahun. |  | Kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota , Instansi /SKPD terkait untuk Promosi Investasi daerah. | Tidak meningkatnya atau berkembangnya realisasi investasi di Sumbar |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Tidak siapnya Kabupaten/kota dengan data peluang investasi sektor unggulan daerahnya untuk dipresentasikan/digelarkan |  | Kabupaten / kota yang tidak mempunyai skala prioritas dalam sektor potensi dan peluang investasi di daerahnya | Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan terkait data peluang investasi yang diinginkan dengan data yang tersedia pada kabupaten/kota. |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Tidak terlaksananya Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota terkait rencana dan kerjasama promosi Sumatera Barat. |  | Kabupaten / kota yang tidak mempunyai skala prioritas dalam sektor potensi dan peluang investasi di daerahnya | Promosi Investasi yang profesional tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya koordinasi yang baik |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Data yang tidak akurat akan menjadi kendala bagi calon investor dalam keinginan berinvestasi |  | Kurangnya pemahaman SDM terhadap regulasi investasi yang terkait data yang up to date | Belum beminatnya calon investor yang serius untuk berinvestasi di Sumatera Barat karena data yang tidak akurat. |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Rendahnya relisasi investasi pengembangan wisata dan pengembangan industri karena masih adanya beberapa hambatan investasi. |  | Pengaruh dari kondisi perekonomian pada daerah yang tidak stabil | Belum tingginya realisasi investasi di Sumatera Barat |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Rendahnya relisasi investasi antara Usaha Besar dengan UMKMK karena beberapa hambatan investasi |  | Pengaruh dari kondisi perekonomian pada daerah yang tidak stabil | Belum tingginya realisasi investasi di Sumatera Barat |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal**    **WASTINI, S.H, M.Hum**  **Pembina**  **NIP. 19621207 199403 2 002** | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI** | | | | |
| **Lampiran 2** | | | | |
|  | | | | |
| **Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Secara Inovatif dan Profesional.** | | | | |
| **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Pemilik Risiko** | **Penyebab** | **Dampak pada Capaian Tujuan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Jumlah personil yang terbatas tidak sesuai dengan beban kerja dapat menghambat dalam melaksanakan penerbitan perizinan tepat waktu | Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peizinan dan Non Perizinan | Badan Kepegawaian tidak dapat memenuhi kebutuhan personil | Personil yang terbatas akan mempengaruhi penerbitan izin yang tepat waktu |
|  |  |  |  |
| Proses verifikasi dokumen untuk kajian teknis yang lama di SKPD Teknis akan memperlambat proses penerbitan izin |  | Kurangnya personil di SKPD Teknis untuk melakukan kajian teknis sementara izin yang diproses sangat banyak | Proses kajian teknis yang lama di SKPD teknis akan berpengaruh pada pelayanan dan penerbitan izin sesuai dengan SOP |
|  |  |  |  |
| Mekanisme proses pelayanan pada PTSP belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi akan menghambat proses penerbitan perizinan |  | Kurangnya komitmen bidang perizinan dalam menerapkan proses pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi | Mekanisme proses pelayanan pada PTSP yang belum berbasis Teknologi Informasi akan menghambat proses penerbitan perizinan |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan kompetensi sehingga akan menghambat penguatan kelembagaan PTSP |  | Instansi perizinan satu pintu Kab/kota kurang serius untuk menguatkan kelembagaan PTSP | Komitmen dan kerjasama instansi perizinan satu pintu Kab/ Kota akan mempengaruhi penguatan kelembagaan PTSP se- Sumatera Barat |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Kemampuan teknis aparatur dalam penyelesaian pekerjaan masih rendah akan menghambat pada penyelesaian proses penerbitan perizinan |  | Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang didapat oleh aparatur teknis | Personil yang kurang kompeten akan berpengaruh terhadap pelayanan perizinan |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan**  **Perizinan dan Non Perizinan**  **INDRA UTAMA, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19750101 199311 1 002** | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

**Lampiran 3**

**Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi**

**Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan SIstem Informasi Informasi Penanaman Modal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian** | | **Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan** | **Target Waktu Penyelesaian** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| 1 | Peserta yang hadir bukan orang yang menangani LKPM, sehingga LKPM yang disampaikan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. | Melakukan pendataan personil atau staf di perusahaan yang bertanggung jawab menangani LKPM | | Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Triwulan II |
| Tidak semua perusahaan PMA dan PMDN yang dapat diberikan pemahaman dalam mengisi LKPM sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian LKPM oleh perusahaan | Melakukan pendataan perusahaan yang harus diberikan bimbingan teknis pengisian LKPM | |  | Triwulan II |
|  |  |  | |  |  |
| 2 | Sedikit sekali (hanya sebagian kecil) perusahaan PMA dan PMDN yang dapat dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal akan menghambat penyampaian LKPM oleh perusahaan dan pencabutan/ pembatalan Izin Prinsip | Melakukan peningkatan jumlah pengawasan ke perusahaan PMA dan PMDN | |  | Triwulan I s.d Triwulan IV |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 3 | Peserta yang hadir tidak sesuai dengan kompetensi sehingga akan menghambat penyediaan data realisasi investasi PMA dan PMDN sesuai dengan target yang telah ditetapkan | Membuat komitment bersam dengan seluruh DPM & PTSP Kabupaten Kota dalam mengumpulkan data realisasi investasi sesuai dengan target | |  | Triwulan I s.d Triwulan IV |
|  | Rendahnya pengetahuan aparatur Kabupaten dan Kota dalam memahami pengendalian pelaksanaan penanaman modal sehingga akan menghambat upaya penggumpulan data realisasi investasi di daerah | Melaksanakan pendidikan dan Pelatihan, Workshop bagi aparatur Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |  | Triwulan I s.d Triwulan IV |
|  |  |  | |  |  |
| 4 | Tidak diperoleh kesepakatan bersama antar pihak yang bermasalah dan hanya dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak didapatkannya solusi akhir penyelesaian permasalahan tersebut. | Melaksanakan evaluasi hasil dari Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan investasi | |  | Triwulan I s.d Triwulan IV |
|  |  |  | |  |  |
| 5 | DPM & PTSP Kabupaten Kota tidak menyampaikan permasalahan investasi ke DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat sehingga menghambat upaya penyelesaian permasalahan investasi di Kabupaten Kota melalui diskusi dalam Forum Investasi Sumatera Barat | Melaksanakan evaluasi hasil dari Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan investasi | |  | Triwulan 3 dan Triwulan 4 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 6 | Pejabat yang hadir lebih didominasi oleh Eselon IV dan Staf sehingga menghambat pelaksanaan penyelesaian permasalahan investasi di Kabupaten/ Kota | Membuat komitment/ kesepakatan dengan seluruh BPMPTSP Kabupaten Kota dalam menyelesaikan permasalahan investasi di daerah | |  | Triwulan 3 |
|  |  |  | |  |  |
| 7 | Data kurang valid sehingga sulit digunakan untuk mengambil keputusan/kebijakan di Bidang Penanaman modal | Membentuk Tim pemantauan realisasi investasi yang melibatkan kabupaten/kota dan menambah jumlah aparatur pengendalian serta mengadakan pelatihan terkait pemantauan ralisasi investasi | |  | September 2017 |
|  |  |  | |  |  |
| 8 | Masih terdapatnya permasalahan lahan yang belum celar and clean sehingga dapat berakibat terkendalanya penetapan KEK Sumatera Barat | mengusulkan ke pusat atau ke Gubernur terkait survey keadaan lahan | |  | September 2017 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | |  | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan**  **SIstem Informasi Penanaman Modal**  **Ir. OLLYANDES, S.Pt**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19660625 199211 1 001** | | |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN** | | | | | |
| **Lampiran 3** | | | | | |
| **Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi** | | | | | |
| **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian** | | **Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan** | **Target Waktu Penyelesaian** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| **1** | Rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan terhadap aturan/kebijakan terkait penanaman modal akan dapat mengarah kepada premanisme, pungutan liar dan permasalahan lahan | mengusulkan Penambahan jumlah peserta dan daerah lokasi sosialisasi | | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | September 2017 |
|  |  |  | |  |  |
| 2 | Aparatur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat masih berorientasi kepada peningkatan PAD sehingga akan dapat mengarah kepada tidak adanya insentif yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada investor | Penegasan dari pimpinan terkait komitmen pemberian insentif dan kemudahan bagi investor | |  | September 2017 |
|  |  |  | |  |  |
| 3 | Potensi dan peluang investasi yang disusun tidak dapat mengakomodir seluruh usulan kabupaten/kota | Sinkronisasi potensi dan peluang investasi dengan kabupaten/kota | |  | September 2017 |
|  |  |  | |  |  |
| 4 | Penyusunan FS Bidang usaha yang disusun belum didukung data lokasi yang valid | Penegasan dari pimpinan terkait ketersediaan lahan di rencana lokasi proyek | |  | September 2017 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 5 | Hasil rumusan tidak dapat ditindaklanjuti oleh provinsi maupun kabupaten/kota | Penyampaian hasil rumusan melalui surat Gubernur kepada kabupaten/kota | |  | September 2017 |
|  |  |  | |  |  |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | |  | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan**  **Iklim Penanaman Modal**    **DELMI, B.Sc**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19611016 198603 1 003** | | |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**  **Lampiran 3**  **Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi**  **Bidang Promosi Penanaman Modal** | | | | | |
|  | | | | | |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian** | | **Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan** | **Target Waktu Penyelesaian** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| 1 | Materi Peluang investasi sektor unggulan kabupaten/kota tidak semuanya dapat terpenuhi sesuai data yang diharapkan/diinginkan . | Koordinasi berkelanjutan dengan Kabupaten / Kota untuk memperoleh data yang akurat tentang potensi dan peluang investasi di daerahnya dan selalu update data | | Bidang Promosi Penanaman Modal | Triwulan II 2017 |
|  |  |  | |  |  |
| 2 | Sedikit atau Tidak ada sama sekali calon investor yang tertarik menanamkan modalnya di Sumbar kurun waktu satu tahun. | Promosi Investasi yang bersifat Komprehensif serta one on one meeting | |  | Triwulan I s.d Triwulan 4 |
|  |  |  | |  |  |
| 3 | Tidak siapnya Kabupaten/kota dengan data peluang investasi sektor unggulan daerahnya untuk dipresentasikan/digelarkan | Koordinasi yang lebih alot dengan kabupaten /kota serta memperhatikan alokasi waktu serta rencana yang telah disepakati. | |  | Triwulan I s.d Triwulan 4 |
|  |  |  | |  |  |
| 4 | Tidak terlaksananya Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota terkait rencana dan kerjasama promosi Sumatera Barat. | Penambahan Tenaga SDM yang profesional yang mengerti dengan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal | |  | Triwulan I s.d Triwulan 4 |
|  |  |  | |  |  |
| 5 | Data yang tidak akurat akan menjadi kendala bagi calon investor dalam keinginan berinvestasi | Penambahan Tenaga SDM yang profesional yang mengerti dengan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal | |  | Triwulan 2 dan Triwulan 3 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 6 | Rendahnya relisasi investasi pengembangan wisata dan pengembangan industri karena masih adanya beberapa hambatan investasi. | Koordinasi dan Data yang lengkap/akurat serta serta anggaran yang cukup agar rencana dapat terlaksana dengan baik | |  | Triwulan 3 dan Triwulan 4 |
|  |  |  | |  |  |
| 7 | Rendahnya relisasi investasi antara Usaha Besar dengan UMKMK karena beberapa hambatan investasi | Koordinasi dan Data yang lengkap/akurat serta serta anggaran yang cukup agar misi dapat terlaksana dengan baik | |  | Triwulan 3 dan Triwulan 4 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | |  | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal**    **WASTINI, S.H, M.Hum**  **Pembina**  **NIP. 19621207 199403 2 002** | | |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN** | | | | | |
| **Lampiran 3** | | | | | |
| **Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Secara Inovatif dan Profesional** | | | | | |
| **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** | | | | | |
|  | | | | | |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian** | | **Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan** | **Target Waktu Penyelesaian** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| 1 | Jumlah personil yang terbatas tidak sesuai dengan beban kerja dapat menghambat dalam melaksanakan penerbitan perizinan tepat waktu | Penambahan personil dari BKD | | Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan | Bulan September Tahun 2017 |
| Proses verifikasi dokumen untuk kajian teknis yang lama di SKPD Teknis akan memperlambat proses penerbitan izin | Komitmen dari Dinas Teknis untuk percepatan penerbitan izin pemohon | |  | Bulan September Tahun 2017 |
| Mekanisme proses pelayanan pada PTSP belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi akan menghambat proses penerbitan perizinan | Mengusulkan kegiatan Penerapan teknologi informasi pada mekanisme pelayanan perizinan | |  | Semester I dan II Tahun 2017 |
|  |  |  | |  |  |
| 2 | Peserta yang hadir tidak sesuai dengan kompetensi sehingga akan menghambat penguatan kelembagaan PTSP | Perlu penegasan tentang kehadiran pejabat terkait penyelenggaran PTSP | |  | Semester II Tahun 2017 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 3 | Kemampuan teknis aparatur dalam penyelesaian pekerjaan masih rendah akan menghambat pada penyelesaian proses penerbitan perizinan | Pendidikan dan Pelatihan kemampuan teknis sektor perizinan | |  | Semester I dan II Tahun 2017 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | |  | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan**  **Perizinan dan Non Perizinan**  **INDRA UTAMA, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19750101 199311 1 002** | | |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |

**RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN**

**Lampiran 4**

**Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi**

**Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan SIstem Informasi Informasi Penanaman Modal**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengendalian yang direncanakan** | | **Media/ Bentuk /Sarana Pengomuikasian** | | | **Penyedia informasi** | | **Penerima Informasi** | | **Waktu Pelaksanaan** | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | |
| 1 | Melakukan pendataan personil atau staf di perusahaan yang bertanggung jawab menangani LKPM | | Surat Permintaan Data Staf yang Menangani LKPM | | | Perusahaan PMA/PMDN | | DPM & PTSP | | Triwulan 3 | |
| Melakukan pendataan perusahaan yang harus diberikan bimbingan teknis pengisian LKPM | | Surat Permintaan Penambahan Anggaran | | | DPM & PTSP | | TAPD, Bappeda, Bakauda | | Triwulan 3 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2 | Melakukan peningkatan jumlah pengawasan ke perusahaan PMA dan PMDN | | Surat Permintaan Penambahan Anggaran | | | DPM & PTSP | | TAPD, Bappeda, Bakauda | | Triwulan 3 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 3 | Membuat komitment bersam dengan seluruh BPMPTSP Kabupaten Kota dalam mengumpulkan data realisasi investasi sesuai dengan target | | Surat Permintaan untuk melaksanakan pengumpulan Data realisasi investasi, Surat untuk mencapai target realisasi investasi di kabupaten/kota | | | DPM & PTSP | | DPM & PTSP Kabupaten/Kota | | Triwulan 3 | |
| Melaksanakan pendidikan dan Pelatihan, Workshop bagi aparatur Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | Surat Edaran, Surat Tugas, Surat Permintaan Pelaksanaan Diklat Pengendalian Penanaman Modal | | | BKPM RI dan DPM & PTSP | | DPM & PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota | | Triwulan 4 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 4 | Melaksanakan evaluasi hasil dari Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan investasi | | Surat Penyampaian Hasil Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi | | | DPM & PTSP | | DPM & PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota | | Triwulan 4 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 5 | Melaksanakan evaluasi hasil dari Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan investasi | | Surat Penyampaian Hasil Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi | | | DPM & PTSP | | BKPM RI dan  DPM & PTSP Kabupaten/Kota | | Triwulan 4 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 6 | Membuat komitment/ kesepakatan dengan seluruh BPMPTSP Kabupaten Kota dalam menyelesaikan permasalahan investasi di daerah | | Surat Edaran, Surat Permintaan Peserta Bimtek | | | DPM & PTSP | | DPM & PTSP Kabupaten/Kota | | Triwulan 3 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 7 | Membentuk Tim pemantauan realisasi investasi yang melibatkan kabupaten/kota dan menambah jumlah aparatur pengendalian serta mengadakan pelatihan terkait pemantauan ralisasi investasi | | SK Gubernur | | | DPM & PTSP dan Biro Hukum | | OPD Terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota | | Bulan September 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 8 | Mengusulkan ke pusat atau ke Gubernur terkait survey keadaan lahan | | Surat Gubernur | | | DPM & PTSP | | BKPM RI | | Bulan September 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | |  | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan**  **SIstem Informasi Penanaman Modal**  **Ir. OLLYANDES, S.Pt**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19660625 199211 1 001** | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN**  **Lampiran 4**  **Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi**  **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | |
| **No** | **Pengendalian yang direncanakan** | | **Media/ Bentuk /Sarana Pengomuikasian** | | | **Penyedia informasi** | | **Penerima Informasi** | | **Waktu Pelaksanaan** | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | |
| 1 | Mengusulkan Penambahan jumlah peserta dan daerah lokasi sosialisasi | | Mengajukan usulan penambahan anggaran pada perubahan anggaran | | | DPM & PTSP | | TAPD | | Bulan September 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2 | Penegasan dari pimpinan terkait komitmen pemberian insentif dan kemudahan bagi investor | | Surat Edaran Gubernur | | | DPM & PTSP | | OPD Terkait | | Bulan September 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 3 | Sinkronisasi potensi dan peluang investasi dengan kabupaten/kota | | Undangan Rapat | | | DPM & PTSP | | Kabupaten/Kota Rencana Lokasi Proyek | | Bulan September 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 4 | Penegasan dari pimpinan terkait ketersediaan lahan di rencana lokasi proyek | | Surat Permintaan Kejelasan Ketersediaan Lahan di rencana lokasi proyek | | | DPM & PTSP | | Kabupaten/Kota Rencana Lokasi Proyek | | Bulan September 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 5 | Penyampaian hasil rumusan melalui surat Gubernur kepada kabupaten/kota | | Surat Gubernur | | | DPM & PTSP | | Bupati/Walikota se Sumatera Barat | | Bulan September 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | |  | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan**  **Iklim Penanaman Modal**    **DELMI, B.Sc**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19611016 198603 1 003** | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN**  **Lampiran 4**  **Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi**  **Bidang Promosi Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | |
| **No** | **Pengendalian yang direncanakan** | | **Media/ Bentuk /Sarana Pengomuikasian** | | | **Penyedia informasi** | | **Penerima Informasi** | | **Waktu Pelaksanaan** | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | |
| 1 | Koordinasi berkelanjutan dengan Kabupaten / Kota untuk memperoleh data yang akurat tentang potensi dan peluang investasi di daerahnya dan selalu update data | | Surat ke Kabupaten/Kota, Evaluasi/Monitoring | | | Bidang Promosi Penanaman Modal DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Kab/Kota, Instansi terkait Penanaman Modal | | Triwulan 1 dan 2 tahun 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2 | Promosi Investasi yang bersifat Komprehensif serta one on one meeting | | Pameran, Presentasi one on one meeting, forum investasi | | | Bidang Promosi Penanaman Modal DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Calon Investor dari DN dan LN yang tertarik mau berinvestasi di Sumatera Barat | | Triwulan 1 s.d 4 tahun 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 3 | Koordinasi yang lebih alot dengan kabupaten /kota serta memperhatikan alokasi waktu serta rencana yang telah disepakati. | | Surat ke Kabupaten/Kota, Rapat Persiapan, Rapat Pelaksanaan dan Rapat Evaluasi/Monitoring | | | Bidang Promosi Penanaman Modal DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Kab/Kota/Instansi terkait Penanaman Modal dan Pelaku Usaha | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 4 | Penambahan Tenaga SDM yang profesional yang mengerti dengan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal | | Surat ke Kabupaten/Kota, Rapat Persiapan, Rapat Pelaksanaan dan Rapat Evaluasi/Monitoring | | | Bidang Promosi Penanaman Modal DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Kab/Kota/Instansi terkait Penanaman Modal dan Pelaku Usaha | | Triwulan 1 s.d 4 tahun 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 5 | Penambahan Tenaga SDM yang profesional yang mengerti dengan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal | | Surat ke Kabupaten/Kota, Rapat Persiapan, Rapat Pelaksanaan dan Rapat Evaluasi/Monitoring, Pelatihan/Sosialisasibtentang Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal | | | Bidang Promosi Penanaman Modal DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Pelaku Usaha, Aparatur DPM & PTSP Provinsi/Kab/Kota khususnya staf yg terkait | | Triwulan 3 & 4 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 6 | Koordinasi dan Data yang lengkap/akurat serta serta anggaran yang cukup agar rencana dapat terlaksana dengan baik | | Surat ke Kabupaten/Kota, Rapat Persiapan, Rapat Pelaksanaan dan Rapat Evaluasi/Monitoring | | | Bidang Promosi Penanaman Modal DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Instansi/OPD terkait, Kab/Kota, Pelaku Usaha | | Triwulan 3  tahun 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 7 | Koordinasi dan Data yang lengkap/akurat serta serta anggaran yang cukup agar misi dapat terlaksana dengan baik | | Surat ke Kabupaten/Kota, Rapat Persiapan, Rapat Pelaksanaan dan Rapat Evaluasi/Monitoring | | | Bidang Promosi Penanaman Modal DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat | | Instansi/OPD terkait, Kab/Kota, Pelaku Usaha | | Triwulan 3  tahun 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | |  | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal**    **WASTINI, S.H, M.Hum**  **Pembina**  **NIP. 19621207 199403 2 002** | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN** | | | | | | | | | | | |
| **Lampiran 4** | | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Secara Inovatif dan Profesional** | | | | | | | | | | | |
| **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **No** | **Pengendalian yang direncanakan** | | **Media/ Bentuk /Sarana Pengomuikasian** | | | **Penyedia informasi** | | **Penerima Informasi** | | **Waktu Pelaksanaan** | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | |
| 1 | Penambahan personil dari BKD | | Surat Permintaan Penambahan Pegawai | | | Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peizinan dan Non Perizinan | | BKD | | Triwulan 2 dan 3 tahun 2017 | |
| Komitmen dari Dinas Teknis untuk percepatan penerbitan izin pemohon | | Instruksi Pimpinan berupa Peraturan ( SK Gubernur atau Pergub ) | | | Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peizinan dan Non Perizinan dan Dinas Teknis | | DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Teknis | | Semester 2  tahun 2017 | |
| Mengusulkan kegiatan Penerapan teknologi informasi pada mekanisme pelayanan perizinan | | Instruksi Pimpinan, Dokumen rencana pembangunan sistem informasi pada mekanisme pelayanan perizinan | | | TAPD, Kepala Badan dan PPTK | | Rekanan Pengadaan | | Semester 2  tahun 2017 | |
|  | Pelatihan bagi Personil untuk semua sektor perizinan | | Surat Edaran, Surat Tugas | | | DPM & PTSP | | Aparatur DPM & PTSP | | Semester 1, 2, 3, dan 4 tahun 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2 | Perlu penegasan tentang kehadiran pejabat terkait penyelenggaran PTSP | | Surat Undangan, Rapat, Sosialisasi | | | Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peizinan dan Non Perizinan | | DPM & PTSP Provinsi/Kab/Kota | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan kemampuan teknis sektor perizinan | | Surat Edaran, Surat Tugas | | | Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Peizinan dan Non Perizinan dan BKPM RI | | Aparatur DPM & PTSP | | Semester 1, 2, 3 dan 4  tahun 2017 | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | |  | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan**  **Perizinan dan Non Perizinan**  **INDRA UTAMA, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19750101 199311 1 002** | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | **Lampiran 5** | | | |
| **Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi** | | | | | | | | | | | |
| **Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan SIstem Informasi Informasi Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **No** | | **Pengendalian yang direncanakan** | | **Bentuk / metode Pemantauan yang Diperlukan** | | | **Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemantauan** | | **Waktu Pelaksanaan Pemantauan** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | |
| 1 | | Melakukan pendataan personil atau staf di perusahaan yang bertanggung jawab menangani LKPM | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala Dinas | | Triwulan 2 | |
| Melakukan pendataan perusahaan yang harus diberikan bimbingan teknis pengisian LKPM | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala Dinas | | Triwulan 2 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2 | | Melakukan peningkatan jumlah pengawasan ke perusahaan PMA dan PMDN | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala Dinas | | Triwulan 1 s.d Triwulan 4 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3 | | Membuat komitment bersam dengan seluruh BPMPTSP Kabupaten Kota dalam mengumpulkan data realisasi investasi sesuai dengan target | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala Dinas | | Triwulan 1 s.d Triwulan 4 | |
| Melaksanakan pendidikan dan Pelatihan, Workshop bagi aparatur Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala Dinas | | Triwulan 1 s.d Triwulan 4 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 4 | | Melaksanakan evaluasi hasil dari Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan investasi | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala Dinas | | Triwulan 1 s.d Triwulan 4 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 5 | | Melaksanakan evaluasi hasil dari Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan investasi | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala Dinas | | Triwulan 1 s.d Triwulan 4 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 6 | | Membuat komitment/ kesepakatan dengan seluruh BPMPTSP Kabupaten Kota dalam menyelesaikan permasalahan investasi di daerah | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala Dinas | | Triwulan 3 dan Triwulan 4 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 7 | | Membentuk Tim pemantauan realisasi investasi yang melibatkan kabupaten/kota dan menambah jumlah aparatur pengendalian serta mengadakan pelatihan terkait pemantauan ralisasi investasi | | Pemantauan Berkelanjutan | | | Kepala DInas | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 8 | | Mengusulkan ke pusat atau ke Gubernur terkait survey keadaan lahan | | Pemantauan Berkelanjutan | | | Kepala DInas | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan**  **SIstem Informasi Penanaman Modal**  **Ir. OLLYANDES, S.Pt**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19660625 199211 1 001** | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| **RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN** | | | | | | | | | | |
| **Lampiran 5** | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 1 : Meningkatkan perbaikan iklim investasi yang berdayasaing dan realisasi investasi** | | | | | | | | | | |
| **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **No** | | **Pengendalian yang direncanakan** | | **Bentuk / metode Pemantauan yang Diperlukan** | | | **Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemantauan** | | **Waktu Pelaksanaan Pemantauan** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | |
| 1 | | Mengusulkan Penambahan jumlah peserta dan daerah lokasi sosialisasi | | Pemantauan Berkelanjutan | | | Kepala DInas | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2 | | Penegasan dari pimpinan terkait komitmen pemberian insentif dan kemudahan bagi investor | | Pemantauan Berkelanjutan | | | Kepala DInas | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3 | | Sinkronisasi potensi dan peluang investasi dengan kabupaten/kota | | Pemantauan Berkelanjutan | | | Kepala DInas | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 4 | | Penegasan dari pimpinan terkait ketersediaan lahan di rencana lokasi proyek | | Pemantauan Berkelanjutan | | | Kepala DInas | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 5 | | Penyampaian hasil rumusan melalui surat Gubernur kepada kabupaten/kota | | Pemantauan Berkelanjutan | | | Kepala DInas | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan**  **Iklim Penanaman Modal**    **DELMI, B.Sc**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19611016 198603 1 003** | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| **RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN** | | | | | | | | | | |
| **Lampiran 5** | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 1 : Meningkatkan Perbaikan iklim investasi yang Berdayasaing dan Realisasi Investasi** | | | | | | | | | | |
| **Bidang Promosi Penanaman Modal** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **No** | | **Pengendalian yang direncanakan** | | **Bentuk / metode Pemantauan yang Diperlukan** | | | **Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemantauan** | | **Waktu Pelaksanaan Pemantauan** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | |
| 1 | | Koordinasi berkelanjutan dengan Kabupaten / Kota untuk memperoleh data yang akurat tentang potensi dan peluang investasi di daerahnya dan selalu update data | | Evaluasi Terpisah | | | Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal | | Tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2 | | Promosi Investasi yang bersifat Komprehensif serta one on one meeting | | Evaluasi Terpisah | | | Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal | | Tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3 | | Koordinasi yang lebih alot dengan kabupaten /kota serta memperhatikan alokasi waktu serta rencana yang telah disepakati. | | Evaluasi Terpisah | | | Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal | | Tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 4 | | Penambahan Tenaga SDM yang profesional yang mengerti dengan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal | | Evaluasi Terpisah | | | Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal | | Tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 5 | | Penambahan Tenaga SDM yang profesional yang mengerti dengan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal | | Evaluasi Terpisah | | | Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal | | Tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 6 | | Koordinasi dan Data yang lengkap/akurat serta serta anggaran yang cukup agar rencana dapat terlaksana dengan baik | | Evaluasi Terpisah | | | Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal | | Tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 7 | | Koordinasi dan Data yang lengkap/akurat serta serta anggaran yang cukup agar misi dapat terlaksana dengan baik | | Evaluasi Terpisah | | | Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal**    **WASTINI, S.H, M.Hum**  **Pembina**  **NIP. 19621207 199403 2 002** | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| **RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN** | | | | | | | | | | |
| **Lampiran 5** | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Secara Inovatif dan Profesional** | | | | | | | | | | |
| **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **No** | | **Pengendalian yang direncanakan** | | **Bentuk / metode Pemantauan yang Diperlukan** | | | **Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemantauan** | | **Waktu Pelaksanaan Pemantauan** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | |
| 1 | | Penambahan personil dari BKD | | Evaluasi Terpisah | | | Inspektorat | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
| Komitmen dari Dinas Teknis untuk percepatan penerbitan izin pemohon | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala DPM & PTSP, Biro Hukum dan Inspektorat | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
| Mengusulkan kegiatan Penerapan teknologi informasi pada mekanisme pelayanan perizinan | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala DPM & PTSP | | Triwulan 3  tahun 2017 | |
| Pelatihan bagi Personil untuk semua sektor perizinan | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala DPM & PTSP | | Triwulan 3 dan 4  tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2 | | Perlu penegasan tentang kehadiran pejabat terkait penyelenggaran PTSP | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala DPM & PTSP | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3 | | Pendidikan dan Pelatihan kemampuan teknis sektor perizinan | | Evaluasi Berkelanjutan | | | Kepala DPM & PTSP | | Triwulan 4  tahun 2017 | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Mengetahui,**  **Kepala DPM & PTSP**  **Provinsi Sumatera Barat**  **MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19740618 199311 1 001** | | | | **Padang, Maret 2017**  **Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan**  **Perizinan dan Non Perizinan**  **INDRA UTAMA, A.P, M.Si**  **Pembina Tk. I**  **NIP. 19750101 199311 1 002** | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |